

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari peran negara dalam mengatur dan mengarahkan distribusi sumber daya ekonomi secara adil dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi utama sistem perekonomian nasional, dengan koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Namun, dalam praktiknya, penguatan ekonomi kerakyatan masih menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari lemahnya kapasitas kelembagaan koperasi, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga ketergantungan pada intervensi negara yang bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan.

Tantangan tersebut tampak pada persoalan kelembagaan, rendahnya partisipasi anggota, terbatasnya kualitas pengelolaan, serta lemahnya keberlanjutan aktivitas koperasi di tingkat lokal. Dalam perspektif ekonomi politik, persoalan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi rakyat tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga pada bagaimana negara merancang, mengimplementasikan, dan mengawal kebijakan yang berpihak pada penguatan basis ekonomi masyarakat. Negara, sebagai aktor politik utama, tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kepentingan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan koperasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan teknokratis, melainkan sebagai bagian dari relasi kekuasaan antara negara, masyarakat, dan kepentingan ekonomi tertentu.

Pemerintah daerah, sebagai perpanjangan tangan negara, memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi kerakyatan di tingkat lokal. Kota Makassar sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia menghadapi dinamika ekonomi yang kompleks, di mana pertumbuhan ekonomi perkotaan sering kali tidak diiringi dengan penguatan basis ekonomi rakyat. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk merumuskan berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, salah satunya melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) yang dirumuskan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Data Badan Pusat Statistik Kota Makassar (2024) menunjukkan bahwa perekonomian Kota Makassar pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,31 persen. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi perkotaan tetap bergerak positif. Bahkan, dalam publikasi yang lebih mutakhir, perekonomian Kota Makassar pada triwulan III tahun 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,39 persen secara *year-on-year* (Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2025). Angka ini menegaskan bahwa Makassar memiliki dinamika ekonomi yang cukup kuat sebagai kota perdagangan dan jasa. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut belum tentu sepenuhnya diikuti oleh penguatan lembaga ekonomi rakyat, khususnya koperasi, sebagai basis ekonomi kerakyatan.

Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan penguatan basis ekonomi rakyat. Dengan kata lain, pertumbuhan

ekonomi kota tidak secara otomatis menghadirkan penguatan ekonomi kerakyatan apabila tidak ditopang oleh kebijakan yang secara serius membangun kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat. Dalam konteks inilah pemerintah daerah memiliki posisi strategis sebagai aktor yang tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak kebijakan publik yang mampu membentuk arah pembangunan ekonomi lokal. Melalui kewenangan kelembagaannya, Pemerintah Kota Makassar memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan yang dapat memperkuat koperasi sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi rakyat.

Salah satu bentuk intervensi kebijakan tersebut adalah Program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) yang lahir melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar 2021-2026 dan menjadi acuan utama program kerja, termasuk GEMASKOP. Dalam hal ini Peraturan Walikota (Perwali) Kota Makassar yaitu Perwali No. 82 Tahun 2023 mengatur struktur dan tugas Dinas Koperasi dan UKM. Kemudian Undang-Undang Perkoperasian yang menjadi Hukum di atasnya, seperti UU No. 25 Tahun 1992 (asas kekeluargaan) yang menjadi landasan umum. Sebagai bagian dari upaya strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Makassar dalam merespons berbagai persoalan struktural yang dihadapi koperasi di tingkat lokal.

Sebelum GEMASKOP dijalankan, pengembangan koperasi di Kota Makassar cenderung berfokus pada aspek administratif dan kelembagaan formal, seperti pendirian koperasi baru, pelaporan tahunan, serta pembinaan manajerial yang bersifat teknis. Pendekatan ini dinilai belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar, yakni rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar kemudian melakukan evaluasi internal terhadap efektivitas program-program pembinaan koperasi yang telah berjalan. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa banyak koperasi yang aktif secara administratif, namun belum berfungsi optimal sebagai wadah ekonomi anggota. Di sisi lain, masih terdapat persepsi di kalangan masyarakat bahwa koperasi sekadar instrumen bantuan pemerintah, bukan sebagai organisasi ekonomi yang berbasis pada prinsip kemandirian, demokrasi, dan partisipasi anggota.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, terdapat 1491 koperasi yang dinaungi dengan rincian 620 koperasi yang aktif dan 871 koperasi yang tidak aktif. Dari kondisi tersebut Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menggagas sebuah pendekatan baru yang tidak hanya menekankan aspek kelembagaan, tetapi juga membangun kesadaran ideologis dan sosial masyarakat tentang koperasi. Dengan pendekatan inilah Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar kemudian melahirkan sebuah Program yaitu Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) sebagai sebuah Gerakan untuk menanamkan dan memperkuat kesadaran ekonomi masyarakat, dan program ini bukan semata-mata program teknokratis, tetapi program yang diharapkan mampu menopang fondasi awal koperasi sebagai penguatan ekonomi kerakyatan.

Program ini tidak hanya bertujuan memperkuat kelembagaan koperasi, tetapi juga membangun kesadaran ideologis masyarakat mengenai pentingnya koperasi sebagai instrumen ekonomi demokratis. Dengan demikian, GEMASKOP dirancang untuk mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap koperasi, dari yang bersifat

pasif dan bergantung pada negara, menuju partisipasi aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan koperasi.

Namun, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, melainkan sangat bergantung pada proses implementasinya. Dalam banyak kasus, kebijakan pemberdayaan ekonomi gagal mencapai tujuan karena lemahnya koordinasi antaraktor, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya komitmen birokrasi pelaksana. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi Program GEMASKOP dijalankan di tingkat lokal, serta sejauh mana program tersebut benar-benar mampu memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya di Kota Makassar.

Penelitian ini menjadi penting karena kajian mengenai GEMASKOP selama ini cenderung bersifat administratif dan deskriptif, serta belum banyak dianalisis dari perspektif ekonomi politik. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran negara dalam penguatan ekonomi kerakyatan melalui Program GEMASKOP di Kota Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Program GEMASKOP sebagai kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Program GEMASKOP dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi Program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) sebagai kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan di Kota Makassar.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Program GEMASKOP dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Politik, khususnya dalam bidang ekonomi politik dan kebijakan publik, dengan memperkaya analisis mengenai peran negara dalam penguatan ekonomi kerakyatan melalui kebijakan koperasi di tingkat lokal.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi kebijakan publik, pemberdayaan koperasi, serta relasi antara negara dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan bagi Pemerintah Kota Makassar, Dinas Koperasi dan UKM, bagi Koperasi, dan bagi masyarakat pada umumnya.

1. Bagi Pemerintah Kota Makassar, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam perumusan serta implementasi kebijakan penguatan koperasi dan ekonomi kerakyatan.
2. Bagi Dinas Koperasi dan UKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Program GEMASKOP.
3. Bagi koperasi dan masyarakat, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami peran koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian dan Kajian mengenai penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan pemberdayaan usaha masyarakat telah banyak dilakukan, baik pada level nasional maupun daerah. Namun demikian, penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi Program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) sebagai kebijakan pemerintah daerah masih sangat terbatas, khususnya di Kota Makassar. Oleh karena itu, telaah terhadap penelitian terdahulu menjadi penting untuk memetakan posisi dan kontribusi penelitian ini.

Anzhari, Hasanuddin, dan Remmang (2025) dalam penelitiannya yang berjudul *Transformasi Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Kasus Kota Makassar)* menekankan bahwa pemberdayaan UKM merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi kerakyatan di Kota Makassar. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena memberikan gambaran empiris mengenai kondisi dan tantangan ekonomi kerakyatan di Makassar, meskipun demikian, fokus penelitian tersebut masih terbatas pada UMKM dan belum menempatkan koperasi sebagai instrumen utama ekonomi kerakyatan. atau program GEMASKOP.

Selanjutnya, Remmang et al. (2023) dalam penelitian berjudul *Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises in South Sulawesi: Makassar City* menjelaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan pemerintah daerah, dukungan kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis pemberdayaan mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Temuan tersebut menjadi landasan penting bagi penelitian ini dalam melihat bagaimana GEMASKOP diimplementasikan sebagai kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam gerakan koperasi.

Penelitian yang lebih spesifik mengenai koperasi dilakukan oleh Nurliana et al. (2025) melalui kajian *Penguatan Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Mikro melalui Pelatihan Pembukuan dan Manajemen Kas*. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi mikro, terutama melalui peningkatan kapasitas manajerial dan pengelolaan keuangan anggota.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hendar dan Kusnadi (2015) dalam kajian *Ekonomi Koperasi* memberikan gambaran penting mengenai dinamika perkembangan koperasi di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif jumlah koperasi terus mengalami peningkatan, namun secara kualitatif banyak koperasi tidak mampu berkembang bahkan menjadi tidak aktif. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya kapasitas manajerial pengurus, rendahnya partisipasi anggota, serta tingginya ketergantungan koperasi terhadap bantuan pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan koperasi tidak secara otomatis mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi kerakyatan, karena keberlanjutan koperasi sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan dan efektivitas pembinaan dari pemerintah.

Sementara itu, Rafiq, Rompas, dan Ruru (2022) dalam penelitian Implementasi Program Ekonomi Kerakyatan di Desa Malenos Baru mengkaji implementasi kebijakan ekonomi kerakyatan dari perspektif administrasi publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sangat memengaruhi keberhasilan program. Meskipun dilakukan pada konteks pedesaan, temuan tersebut relevan secara konseptual untuk menganalisis implementasi Program GEMASKOP di tingkat perkotaan.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah banyak penelitian yang membahas pemberdayaan ekonomi kerakyatan, UMKM, dan koperasi, masih terdapat celah penelitian (research gap) terkait kajian implementasi Program GEMASKOP secara spesifik sebagai kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan di Kota Makassar. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kekosongan tersebut dengan menganalisis implementasi GEMASKOP, serta dampaknya terhadap penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.

Table 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Temuan Utama	Relevansi Penelitian
1	Anzhari, A., Hasanuddin, A., & Remmang, H. (2025)	Transformasi Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Kota Makassar)	Pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan dipengaruhi konsistensi kebijakan pemerintah daerah	Fokus pada UMKM, sedangkan penelitian ini berfokus pada koperasi melalui Program GEMASKOP

2	Remmang, H., et al. (2023)	Empowerment of MSMEs in South Sulawesi: Makassar City	Sinergi kebijakan dan partisipasi masyarakat menjadi faktor keberhasilan pemberdayaan ekonomi	Tidak membahas koperasi dan tidak menganalisis kebijakan ekonomi politik secara spesifik
3	Nurliana, I. W., et al. (2025)	Penguatan Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Mikro melalui Pelatihan Pembukuan dan Manajemen Kas	Kapasitas manajerial koperasi meningkatkan kinerja ekonomi anggota	Fokus pada aspek teknis manajemen, bukan implementasi kebijakan
4	Hendar & Kusnadi (2015)	<i>Ekonomi Koperasi</i> (kajian empiris perkembangan koperasi di Indonesia)	Banyak koperasi tidak aktif karena lemahnya manajemen, partisipasi anggota yang rendah, serta ketergantungan pada bantuan pemerintah	Menunjukkan fenomena kegagalan koperasi secara umum, namun tidak mengkaji implementasi kebijakan daerah
5	Rafiq, M., Rompas, W., & Ruru, J. (2022)	Implementasi Program Ekonomi Kerakyatan di Desa Malenos Baru	Kegagalan implementasi dipengaruhi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Analisis implementasi kebijakan ini menggunakan pendekatan administrasi publik	Konteks pedesaan dan tidak mengkaji koperasi maupun GEMASKOP, namun memiliki konteks yang cenderung sama terhadap implementasi kebijakannya.

1.5.2 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam bidang koperasi dan usaha kecil menengah. Renstra tersebut menjadi dasar arah kebijakan, sasaran, dan program prioritas yang disusun untuk memperkuat kelembagaan koperasi, meningkatkan daya saing usaha kecil menengah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif.

Dalam konteks penelitian ini, Program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) dapat dipahami sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap koperasi sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Posisi Dinas Koperasi dan UKM sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM juga diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2023 yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat daerah tersebut.

Dengan demikian, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar 2021–2026 tidak hanya menjadi landasan administratif, tetapi juga menjadi arah kebijakan yang menegaskan bahwa penguatan koperasi perlu dilakukan tidak sebatas pada pembinaan kelembagaan, melainkan juga melalui upaya membangun kesadaran, partisipasi, dan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka itulah GEMASKOP diposisikan sebagai salah satu instrumen kebijakan yang relevan untuk dikaji.

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1 Konsep Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Konsep ini menekankan pentingnya pemerataan, keadilan sosial, serta partisipasi masyarakat dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Di Indonesia, pendekatan ini sangat relevan karena gagasan ekonomi kerakyatan memiliki akar kuat dalam pemikiran nasional, khususnya sebagaimana tercermin dalam semangat Pasal 33 UUD 1945 dan memiliki relevansi historis yang kuat dengan salah satu tokoh kemerdekaan yaitu Mohammad Hatta. Pemikiran Mohammad Hatta mengenai koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional mencerminkan pandangan ekonomi politik yang menolak dominasi kapitalisme liberal dan menekankan pentingnya demokrasi ekonomi.

Pemikiran mengenai koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan tidak dapat dilepaskan dari gagasan Mohammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Menurut Hatta, koperasi bukan sekadar badan usaha yang berorientasi pada keuntungan, melainkan wadah pemberdayaan masyarakat yang memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk berpartisipasi dalam kepemilikan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan secara demokratis. Dengan demikian, koperasi menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus

memperkuat kemandirian masyarakat dalam menghadapi dinamika pembangunan ekonomi.

Hatta memandang bahwa tanpa intervensi negara dan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, proses pembangunan akan cenderung menghasilkan ketimpangan dan marginalisasi kelompok ekonomi kecil. Dalam hal ini, Koperasi dipandang sebagai bentuk kelembagaan ekonomi yang paling sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan karena menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Prinsip demokrasi ekonomi, kebersamaan, dan solidaritas menjadi ciri utama koperasi sebagai institusi ekonomi rakyat. Namun, dalam praktiknya, koperasi sering kali menghadapi berbagai persoalan struktural, seperti lemahnya kapasitas manajerial, rendahnya partisipasi anggota, serta ketergantungan pada bantuan pemerintah.

Dalam banyak kasus, koperasi cenderung diperlakukan sebagai objek kebijakan administratif semata, bukan sebagai gerakan ekonomi yang tumbuh dari kesadaran masyarakat. Kondisi inilah yang menyebabkan koperasi kehilangan fungsi ideologis dan sosialnya sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan.

Dalam konteks ini, Program GEMASKOP dipahami sebagai kebijakan yang berupaya menghidupkan kembali makna koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. GEMASKOP tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah atau kinerja koperasi secara administratif, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat mengenai koperasi sebagai instrumen ekonomi yang demokratis dan berkelanjutan.

1.6.3 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk merespons permasalahan publik. Kebijakan tidak berhenti pada tahap perumusan, tetapi harus diimplementasikan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam banyak kasus, tahap implementasi justru menjadi titik paling krusial yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor dan kepentingan, serta berlangsung dalam konteks sosial dan politik yang dinamis. Kebijakan yang dirancang secara baik di tingkat perencanaan dapat mengalami distorsi ketika dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, resistensi pelaksana, atau rendahnya respons masyarakat. Kajian mengenai implementasi kebijakan publik berangkat dari kesadaran bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi sangat bergantung pada proses pelaksanaannya di lapangan.

Dalam banyak kasus, kebijakan yang dirancang secara baik dan rasional justru gagal mencapai tujuan karena mengalami berbagai hambatan pada tahap implementasi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan menjadi salah satu fokus utama dalam studi kebijakan publik, khususnya dalam konteks negara berkembang dengan kompleksitas birokrasi dan dinamika sosial yang tinggi. Dalam studi implementasi kebijakan publik, George C. Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan kebijakan tersebut untuk dijalankan secara efektif oleh

aparatus pelaksana dan diterima oleh kelompok sasaran. Edwards III menekankan bahwa implementasi bukan sekadar pelaksanaan administratif, melainkan proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam lingkungan birokrasi dan sosial masyarakat.

Menurut Edwards III (1980), terdapat empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat tercapai.

Pertama, komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Komunikasi yang jelas dan konsisten akan memudahkan pelaksanaan kebijakan, sedangkan komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam implementasi program.

Kedua, sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta kemampuan teknis yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi faktor penting agar program dapat dijalankan secara optimal.

Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana berkaitan dengan komitmen, kesediaan, dan respons aparatur dalam menjalankan kebijakan. Meskipun suatu kebijakan telah dirancang dengan baik, implementasi dapat mengalami hambatan apabila pelaksana tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan program.

Keempat, struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi, pembagian tugas, prosedur kerja, dan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah koordinasi dan meningkatkan efektivitas implementasi program.

Dalam penelitian ini, model implementasi kebijakan George C. Edwards III digunakan sebagai alat analisis untuk melihat proses implementasi Program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) di Kota Makassar, khususnya dalam menganalisis aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Sementara itu, perspektif ekonomi politik tetap digunakan sebagai kerangka utama untuk memahami peran pemerintah daerah dalam penguatan ekonomi kerakyatan melalui kebijakan koperasi.

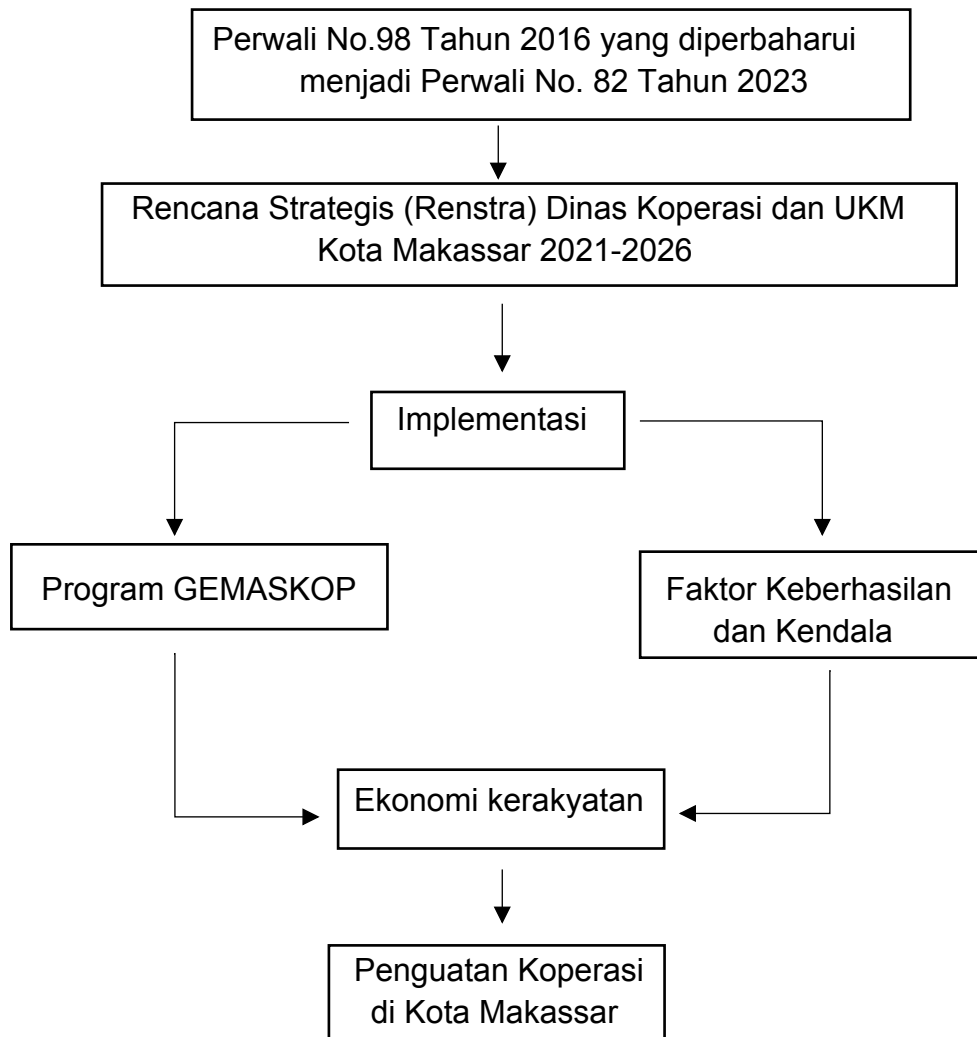
1.7 Kerangka Pemikiran

Program GEMASKOP dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam kerangka kebijakan daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi kelembagaan perangkat daerah serta arah pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan strategis. Dalam implementasinya, program ini melibatkan berbagai aktor, seperti aparatur dinas, pengurus koperasi, anggota koperasi, dan masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi politik untuk melihat posisi negara atau pemerintah daerah dalam mengarahkan pembangunan ekonomi rakyat, konsep ekonomi kerakyatan untuk memahami orientasi substantif program, serta implementasi kebijakan untuk menganalisis proses pelaksanaan GEMASKOP di lapangan. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana GEMASKOP mampu

dijalankan sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan di Kota Makassar, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan dan kendalanya.

Secara konseptual, kerangka pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan seperti pada bagan berikut:



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan **jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif**. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi Program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) sebagai kebijakan publik, birokrasi, dan masyarakat dalam penguatan ekonomi kerakyatan di Kota Makassar. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali informasi secara lebih rinci mengenai pelaksanaan program, peran para aktor, dinamika kebijakan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual fenomena implementasi kebijakan GEMASKOP, termasuk dinamika pelaksanaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendala program ini di lapangan. Penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk memahami makna, proses, serta konteks sosial-politik yang melingkupi pelaksanaan program tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai tepat untuk menjelaskan bagaimana kebijakan GEMASKOP dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam mendorong penguatan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan.

2.2 Lokasi dan Fokus Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah **Kota Makassar**, dengan sasaran yaitu:

1. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
2. Koperasi-koperasi yang menjadi peserta atau sasaran Program GEMASKOP.
3. Anggota Koperasi dan Masyarakat Umum yang berkaitan dengan pelaksanaan program.
4. Pihak lain yang relevan dengan Program GEMASKOP

Adapun fokus penelitian ini adalah implementasi Program GEMASKOP sebagai kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan di Kota Makassar. Fokus tersebut dijabarkan ke dalam beberapa aspek kajian sebagai berikut:

1. Bentuk dan proses pelaksanaan Program GEMASKOP.
2. Peran aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi program.
3. Komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan GEMASKOP.
4. Ketersediaan sumber daya dalam mendukung implementasi program.
5. Sikap dan komitmen pelaksana program.
6. Struktur birokrasi dan koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan program.
7. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Program GEMASKOP.
8. Kontribusi Program GEMASKOP terhadap penguatan ekonomi kerakyatan di Kota Makassar dalam perspektif ekonomi politik.

2.3 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program GEMASKOP.

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pejabat atau aparatur pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, terutama yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Program GEMASKOP.
2. Pengurus koperasi yang pernah terlibat atau menjadi sasaran kegiatan dalam Program GEMASKOP.
3. Anggota koperasi atau masyarakat penerima manfaat Program GEMASKOP.
4. Pendamping koperasi atau pihak lain yang memahami pelaksanaan program (jika ada).
5. Akademisi atau pemerhati koperasi, apabila diperlukan sebagai informan pendukung untuk memperkaya analisis.

Table 2. Nama-nama Informan

No	Nama	Jabatan/Status di Masyarakat
1	Muhammad Ilham	Pengawas Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar
2	Inayah	Koordinator Humas Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar
3	Andre	Anggota Humas Inkubator Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar
4	Muh. Aqsha	Pengurus Koperasi Mahasiswa
5	Fadilla	Pengawas Koperasi Mahasiswa
6	Brayen	Pelaku UMKM
7	Nawir	Masyarakat
8	Muh. Syardi	Masyarakat
9	H. Andi Amri Bakti, S.Sos, M.M., M.Si.	Akademisi dan Pemilik Koperasi Simpan Pinjam

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan penelitian untuk memperoleh data mengenai proses implementasi Program GEMASKOP, peran aktor, serta kendala dan dampak program. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam dan fleksibel sesuai dengan dinamika wawancara.

2.4.2 Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan pelaksanaan Program GEMASKOP, serta interaksi antara pemerintah, koperasi, dan masyarakat. Observasi ini bertujuan untuk memperkuat data hasil wawancara.

2.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan program, peraturan daerah, serta arsip-arsip lain yang relevan dengan Program GEMASKOP.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, seperti data mengenai bentuk implementasi program, peran aktor, komunikasi kebijakan, sumber daya, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan GEMASKOP.
2. Penyajian Data, yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Dalam penelitian ini, penyajian data digunakan untuk menggambarkan proses implementasi Program GEMASKOP secara sistematis dan terstruktur.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu proses penafsiran data dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Tahap ini merupakan proses penafsiran data untuk menemukan makna, pola, serta hubungan antartemuan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian agar memiliki tingkat kepercayaan yang kuat. Dengan cara ini, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis.

Analisis data dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penyusunan laporan penelitian.

2.6 Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan agar data yang diperoleh lebih kredibel, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian meliputi:

1. Triangulasi sumber, dengan membandingkan data dari berbagai informan. Teknik ini digunakan untuk melihat konsistensi informasi dari berbagai sudut pandang.
2. Triangulasi teknik, dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan teknik ini, peneliti dapat menguji apakah informasi yang diperoleh melalui satu teknik didukung oleh teknik pengumpulan data lainnya.

Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian.